

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM MENDUKUNG REHABILITASI DAN REINTEGRASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan)

Eva Noor Elia¹, Agus Sya'bani Arlan², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: enoorelia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman keluarga terhadap gejala gangguan kesehatan jiwa akibat minimnya sosialisasi, lambatnya penanganan oleh keluarga pasien, dan kurangnya koordinasi antar lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui purposive sampling dengan partisipasi 11 orang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator seperti kemampuan selektif, tingkat keabsahan, pengetahuan, dan kemampuan sudah baik. Akan tetapi, indikator seperti sosialisasi, penerapan inovasi, kinerja, kedisiplinan, kegiatan, dan tanggung jawab masih perlu diperbaiki. Faktor pendukung termasuk alur pelayanan yang sesuai, kevalidan data, dan ketersediaan dana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman keluarga, koordinasi lintas sektor yang kurang baik, akses terbatas ke layanan kesehatan jiwa, dan kurangnya inovasi. Untuk meningkatkan peran Dinas Kesehatan, disarankan agar pengelola jiwa dapat meningkatkan kinerja sesuai ketetapan, memperbanyak SDM terlatih, dan melakukan pendekatan lebih kepada keluarga pasien. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperbaiki strategi penanganan dan dukungan terhadap ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata Kunci: *Koordinasi Lintas Sektor, Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Inovasi Kesehatan Jiwa*

ABSTRACT

This study examines the role of the Health Department of Hulu Sungai Utara Regency in supporting the rehabilitation and reintegration of People with Mental Disorders (ODGJ) and the factors influencing it. The identified problem phenomenon includes the lack of family understanding of mental health disorder symptoms due to insufficient socialization, slow patient handling by families, and lack of inter-sectoral coordination. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through purposive sampling involving 11 participants. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The results show that indicators such as selective ability, validity level, knowledge, and ability are good. However, indicators such as socialization, innovation implementation, performance, discipline, activities, and responsibility need improvement. Supporting factors include the provision of service flow, data validity, and budget availability. Meanwhile, inhibiting factors include lack of family understanding, poor inter-sectoral coordination, limited access to mental health services, and lack of innovation. To enhance the Health Department's role, it is recommended that mental health managers improve performance as stipulated, increase trained human resources, and approach ODGJ families more closely. The results are significant for improving strategies and support for ODGJ in Hulu Sungai Utara Regency.

Keywords: *Inter-Sectoral Coordination, Human Resources, Socialization, Mental Health Innovation*

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan masalah internasional yang terus meningkat setiap tahunnya jika tidak ditangani dengan baik. Gangguan jiwa mencakup berbagai masalah dengan gejala yang berbeda, seperti pola pikir abnormal, emosi, perilaku, dan hubungan sosial yang terganggu. Meskipun tidak menyebabkan kematian langsung, gangguan jiwa mengakibatkan penurunan produktivitas dan

menjadi beban bagi keluarga serta masyarakat. Dampak sosialnya termasuk penolakan, pengucilan, dan diskriminasi, sedangkan dampak ekonominya mencakup hilangnya hari produktif dan biaya perawatan yang tinggi. Pemerintah, sesuai dengan pasal 149 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan, dan mengganggu ketertiban umum. Pasal ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali produktif secara sosial dan ekonomi (Selamat Riadi, 2021).

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan memiliki 13 Puskesmas yang berperan penting dalam menangani masalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2022), skizofrenia adalah diagnosis tertinggi di wilayah ini, khususnya di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan, dengan jumlah kasus masing-masing 50 dan 75, sehingga totalnya mencapai 125 kasus. Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita seperti halusinasi dan delusi (Grace, Rozalina and Zakiah, 2017). Gejala skizofrenia terbagi menjadi gejala positif, yang mencakup halusinasi, delusi, dan perilaku atau cara bicara yang tidak teratur, serta gejala negatif, yang mencakup penurunan keinginan berbicara dan bersosialisasi, menurunnya minat dan motivasi, kehilangan emosi yang biasanya dirasakan, dan kecenderungan untuk tetap malas dan lesu. Penanganan skizofrenia memerlukan perhatian khusus dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mengurangi dampak negatifnya dan membantu penderita agar dapat berfungsi kembali secara optimal dalam masyarakat.

Penyebab skizofrenia belum diketahui secara pasti, namun faktor genetik, lingkungan, perbedaan struktur otak, keseimbangan kimia di otak, dan penggunaan obat-obatan tertentu diduga berkontribusi terhadap peningkatan risiko skizofrenia. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan penting dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 7 kasus ODGJ yang dirantai dan dikurung, dengan rincian 1 kasus di Puskesmas Amuntai Selatan, 2 kasus di Sungai Malang, 1 kasus di Banjarang, 2 kasus di Pasar Sabtu, dan 1 kasus di Amuntai Utara. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi pasien ke masyarakat dilakukan melalui beberapa program, yaitu program rehabilitasi rawat inap (*inpatient*) di klinik atau rumah sakit selama beberapa minggu hingga bulan, program rehabilitasi rawat jalan (*outpatient*) dengan perawatan di luar rumah sakit, serta program rehabilitasi komunitas yang melibatkan dukungan dari kelompok mantan pasien yang telah sembuh. Program-program ini dirancang untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang diperlukan, serta dukungan komunitas untuk mempercepat proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi orang dengan gangguan jiwa masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pemahaman keluarga terhadap gejala gangguan jiwa masih kurang, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait kesehatan jiwa dan lambatnya penanganan oleh keluarga pasien, sehingga kondisi pasien seringkali memburuk (Keluarga Pasien ODGJ, 2024). Kedua, koordinasi antarlintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan rumah sakit kurang optimal akibat komunikasi yang tidak stabil (Pengelola Jiwa Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan, 2023). Ketiga, terdapat kekurangan sumber daya manusia terlatih di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan (Pengelola Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023). Permasalahan ini menghambat efektivitas upaya rehabilitasi dan reintegrasi pasien ODGJ. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan peningkatan sosialisasi, perbaikan koordinasi antarlintas sektor, dan peningkatan jumlah serta kualitas tenaga terlatih di seluruh wilayah.

(Selamat Riadi 2021) menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi kendala signifikan dalam pemenuhan hak ODGJ, termasuk tingginya angka pasien yang dirantai dan dipasung akibat kurangnya perhatian pemerintah, ketiadaan regulasi dan SOP, minimnya fasilitas pendukung seperti obat-obatan, ketiadaan rumah rehabilitasi, serta sulitnya akses ke Rumah Sakit Jiwa. Selain itu, tidak ada perlindungan terhadap bentuk penelantaran dan kekerasan terhadap ODGJ. Sementara itu, penelitian (Farhan 2020) di Yayasan Al-Fajar Berseri Bekasi menunjukkan bahwa lembaga sosial ini memainkan peran penting dalam rehabilitasi sosial ODGJ. Dengan metode

kualitatif, Farhan menemukan bahwa yayasan ini menjalankan proses rehabilitasi melalui pelayanan dan pembinaan, termasuk pemeriksaan kesehatan awal, isolasi bagi pasien agresif, dan penanganan melalui metode kelompok dan individu. Yayasan ini melaksanakan enam peran utama: penyembuhan, pendampingan, pengembangan, sosialisasi, advokasi, dan re-sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan perubahan perilaku positif pada warga binaan setelah menjalani rehabilitasi.

Menurut teori peran oleh (Siagian 2016), pemerintah harus berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman keluarga mengenai gangguan jiwa, kurangnya koordinasi antar sektor terkait, dan kesenjangan geografis yang menghambat akses pelayanan kesehatan jiwa. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi melibatkan pemulihan kondisi fisik dan psikologis, sementara reintegrasi bertujuan untuk memasukkan kembali individu ke masyarakat secara normal dan produktif. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan penanganan yang lambat, serta minimnya fasilitas pendukung seperti rumah rehabilitasi dan akses ke Rumah Sakit Jiwa.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berfokus pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai referensi terpercaya. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono *et al.*, 2018). Desain operasional penelitian mengacu pada teori peran menurut Sondang P. Siagian, dengan variabel dan subvariabel yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan membercheck (Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018). Kesimpulannya, penelitian ini dirancang secara sistematis dengan metode yang cermat dan valid untuk menggali informasi terkait peran Dinas Kesehatan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ di wilayah tersebut, dengan memperhatikan ketelitian dan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mendukung Rehabilitasi dan Reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan

Berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan juga pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, serta teori peran menurut Sondang P. Siagian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didasarkan pada kerangka hukum yang kuat dan teori yang terstruktur (Siagian, 2016). Undang-undang tersebut memberikan dasar yang kokoh untuk menyediakan layanan bagi penderita gangguan jiwa, sementara teori peran memberikan landasan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran Dinas Kesehatan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi orang dengan gangguan jiwa. Dimensi peran yang dijelaskan dalam teori tersebut, seperti stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri, memberikan pandangan yang komprehensif tentang berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Pertama, aspek stabilisator. Dinas kesehatan menunjukkan kemampuan selektif yang baik dalam mengkoordinir penanganan ODGJ, dengan melakukan langkah-langkah seperti pengobatan berkala, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih spesifik, dan pelaksanaan pelatihan untuk reintegrasi ke masyarakat. Namun, dalam aspek sosialisasi, terlihat bahwa upaya dinas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada kegiatan seperti workshop dan penyuluhan terjadwal, namun kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan frekuensi sosialisasi yang terbatas

menunjukkan bahwa aspek ini belum optimal. Hal ini tidak selaras dengan teori peran yang mengamanatkan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman yang luas dan efektif terhadap gangguan jiwa (Sondang P. Siagian, 2016). Oleh karena itu, peningkatan dalam aspek sosialisasi, termasuk peningkatan frekuensi dan cakupan kegiatan, perlu menjadi fokus dalam memperbaiki peran Dinas Kesehatan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ.

Kedua, aspek inovator. Secara keseluruhan, tingkat keabsahan dalam proses pengumpulan dan pelaporan data terlihat baik, seperti yang terlihat dari wawancara dengan beberapa pengelola program di puskesmas setempat. Mereka menggambarkan bahwa data yang dilaporkan rutin setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kevalidan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, terkait dengan penerapan inovasi, terdapat kekurangan yang mencolok. Meskipun program-program yang ada dijalankan dengan baik, namun tidak ada inovasi yang signifikan yang telah diimplementasikan. Pengelola program mengakui bahwa mereka hanya mengandalkan program yang sudah ada dan belum mampu menghasilkan ide-ide inovatif baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses administratif terkait pengumpulan data dan pelaporan telah berjalan dengan baik, namun masih ada ruang untuk meningkatkan aspek inovasi dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ. Sebagai solusi, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mendorong pengembangan inovasi dalam program-program rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ. Langkah-langkah seperti pemberian insentif untuk ide-ide baru, pelatihan untuk meningkatkan kreativitas, dan kolaborasi dengan pihak eksternal dapat membantu dalam menciptakan solusi-solusi inovatif yang lebih efektif dan berkelanjutan (Sondang P Siagian, 2016).

Ketiga, aspek modernisator. Dinas Kesehatan telah menyediakan pengetahuan melalui pelatihan, pendidikan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengarahkan pasien ke proses rehabilitasi. Selain itu, kemampuan mereka tercermin dalam pengadaan dana untuk rehabilitasi, pelatihan kader kesehatan jiwa, serta pengadaan petugas pendamping kesehatan jiwa. Hasilnya, keluarga pasien merasa terbantu dan pasien menunjukkan perbaikan dalam kondisi mereka. Dinas Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Sondang P Siagian (2016) yang menyatakan bahwa teori bahwa pemerintah, sebagai modernisator, harus mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, dalam hal ini, sumber daya kesehatan jiwa.

Keempat, aspek pelopor. Secara umum, kinerja dinas kesehatan tersebut masih belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterlibatan keluarga pasien ODGJ, serta kekurangan dalam SDM yang terlatih dalam penanganan gangguan kesehatan jiwa. Terdapat beberapa tanggapan dari berbagai pihak yang mengindikasikan kebutuhan akan peningkatan kinerja dan kedisiplinan dinas kesehatan. Misalnya, kebutuhan akan jadwal yang lebih terstruktur untuk pemantauan pasien yang telah menjalani rehabilitasi lebih lanjut, serta perlunya peningkatan jumlah dan kualitas petugas pengelola jiwa di setiap Puskesmas. Selain itu, kedisiplinan dalam hal penanganan pasien dan pengelolaan sumber daya perlu diperhatikan lebih serius. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang terlatih dalam bidang kesehatan jiwa, serta meningkatkan edukasi kepada keluarga pasien ODGJ agar lebih memahami gejala dan penanganan yang tepat.

Kelima, aspek pelaksana sendiri, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa meskipun terdapat kegiatan kunjungan rumah yang dijadwalkan, frekuensinya kurang terpenuhi dan koordinasi lintas sektor terkait masih perlu ditingkatkan. Tanggung jawab dalam penanganan ODGJ juga belum sepenuhnya dipenuhi, terutama dalam hal pelatihan sumber daya manusia yang terlatih dan koordinasi antarinstansi. Diperlukan peningkatan kinerja dinas dalam mengkoordinasikan tim pelaksana kesehatan jiwa (TPKJM) serta melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan pengelola kesehatan jiwa. Selain itu, koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan untuk memastikan tanggung jawab dalam penanganan ODGJ dapat dipenuhi secara efektif. Hal ini sesuai dengan temuan Sondang P. Siagian (2016) yang menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjalankan tanggung jawab nasional terkait kesehatan jiwa.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mendukung Rehabilitasi dan Reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mendukung Rehabilitasi dan Reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Memberikan alur pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petugas kesehatan terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terlihat bahwa peran dinas tersebut dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan sudah baik. Mereka secara terjadwal melakukan pengobatan dan pemantauan rutin terhadap pasien ODGJ. Selain itu, dinas juga membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TPKJM) serta melatih kader kesehatan jiwa untuk memantau proses rehabilitasi secara langsung. Adanya kerjasama antarinstansi, seperti dengan rumah sakit pembaluh batung dan rumah sakit sambang lihum, juga mendukung proses reintegrasi pasien ODGJ ke dalam masyarakat. Dengan adanya arahan alur pelayanan yang baik, dinas kesehatan berhasil memberikan bimbingan yang sesuai untuk kesembuhan pasien ODGJ dan integrasi mereka kembali ke masyarakat.

- b. Kevalidan data yang dipertanggung jawabkan setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan pasien ODGJ

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program jiwa di Puskesmas Amuntai Selatan, terlihat bahwa proses pelaporan data terkait rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik. Mereka menyampaikan bahwa data dilaporkan secara langsung atau melalui media online, menunjukkan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku, mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan untuk mengelola data dengan akurat dan sesuai standar. Fakta lapangan juga memperlihatkan bahwa alur pelaporan data melibatkan petugas pengelola jiwa yang turun langsung ke lapangan, memastikan kevalidan informasi yang disampaikan. Langkah ini juga memberikan dasar yang kuat bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ. Hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa di wilayah tersebut.

- c. Ketersediaan dana anggaran untuk rehabilitasi lebih lanjut agar dapat berintegrasi kembali kepada masyarakat

Dari hasil wawancara dengan pengelola program Keswa di Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara dan Puskesmas Sungai Malang, terungkap bahwa Dinas Kesehatan telah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan reintegrasi pasien ODGJ. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan kader kesehatan jiwa, memperlihatkan komitmen dalam memberikan pemahaman luas terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah menyediakan petugas pendamping kesehatan jiwa untuk membantu pengobatan pasien ODGJ, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental. Pasien yang direhabilitasi menunjukkan perbaikan kondisi, dan masyarakat lebih mudah dalam menangani mereka ketika mengalami ketidaknormalan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di wilayah tersebut, sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya pemahaman keluarga terhadap gejala gangguan kesehatan jiwa dikarenakan kurangnya sosialisasi yang bersasaran kepada masyarakat.

Para responden menyatakan kurangnya informasi dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi terkait Skrining Gangguan Mental Emosional (GME) serta aplikasi si jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dalam menyampaikan informasi tentang gejala kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh. Fakta lapangan juga menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum merata dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, mengakibatkan kesenjangan pengetahuan yang sempit terkait masalah kesehatan jiwa. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ di Sungai Malang dan Amuntai Selatan dalam hal sosialisasi belum dapat dianggap memadai.

- b. Kurangnya koordinasi antar lintas sektor terkait

Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang kesehatan jiwa. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan bagi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TPKJM) agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan gangguan jiwa. Fakta lapangan juga menyoroti kurangnya koordinasi antar sektor terkait dalam menangani ODGJ. Meskipun diakui bahwa tanggung jawab terhadap pasien ODGJ adalah tanggung jawab bersama lintas sektor, Dinas Kesehatan dianggap perlu lebih bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kerjasama antar sektor tersebut.

- c. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di setiap Desa, Kelurahan, dan Kecamatan

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam kesehatan jiwa, khususnya untuk menangani pasien ODGJ yang kondisinya belum stabil. Hasil observasi juga menyoroti kebutuhan akan lebih banyaknya petugas pengelola jiwa di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih baik dalam penanganan pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Selain itu, kurangnya pemahaman keluarga terhadap gejala awal gangguan jiwa juga menjadi kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman keluarga, yang dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya keluarga pasien, mengenai gejala awal gangguan jiwa serta pentingnya penanganan yang cepat dan tepat.

- d. Kurangnya inovasi dalam bekerja hanya mengandalkan program yang sudah dijalankan

Pernyataan dari Ibu Nida Failasofa (2023) menyatakan bahwa dinas tersebut tidak memiliki inovasi, namun memiliki dukungan berupa program dan dana. Begitu pula dengan pernyataan Bapak Hasnan (2023) yang menyatakan bahwa inovasi belum menonjol karena mereka menjalankan sesuai dengan program yang ada. Observasi juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan hanya mengandalkan program yang ada tanpa adanya inovasi yang mencolok. Hal ini menandakan bahwa terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan ide-ide baru atau pendekatan yang lebih efektif dalam penanganan rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ. Seharusnya, Dinas Kesehatan perlu mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta memberikan solusi yang lebih baik dalam menangani pasien ODGJ.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Secara umum, dinas tersebut telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya inovasi dalam

pekerjaan, dan pemahaman yang belum memadai terhadap kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Kesehatan dalam upaya mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ dapat dibagi menjadi pendorong dan penghambat. Faktor pendorong mencakup adanya alur pelayanan yang sesuai dengan standar, kevalidan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketersediaan dana untuk rehabilitasi. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya koordinasi lintas sektor, kesenjangan geografis, dan kurangnya inovasi dalam pekerjaan. Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ, disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mengembangkan inovasi dalam pekerjaan, dan meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait. Selain itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang terlatih di bidang kesehatan jiwa, serta pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga pasien untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap proses rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. and Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pertama. Edited by E. Wahyudin. Bandung: Prenada Media Group.
- Farhan, D. (2020) 'Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Al-Fajar Berseri Di Bekasi', *Repository.Uinjt.Ac.Id*, pp. 1–261.
- Grace, R., Rozalina and Zakiah, M. (2017) 'Perbedaan tingkat kognitif pada pasien skizofrenia yang baru dirawat dan setelah perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Kota Pontianak', *Jurnal Kesehatan Khatulistiwa*, 3(2), pp. 485–499.
- Muhammad Hidayatullah, G. (2021) 'Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>.
- Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) 'Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.
- Selamat Riadi (2021) 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 182–196. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7385>.
- Siagian, S.P. (2016) *Teori Pengembangan Organisasi*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Bumi Aksara, 2002 ; 2012.
- Sugiyono, S. *et al.* (2018) 'Development of authentic assessment instruments for saintifical learning in tourism vocational high schools', *Jurnal Pendidikan ...* [Preprint].
- Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.